

## **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA PEMILU RAYA PRODI PPKn UNESA PERIODE 2016-2017**

**Altra Amaseta Riciani**

12040254034 (Prodi S-1 PPKn, FISH, UNESA) [altraamasetariciani@yahoo.com](mailto:altraamasetariciani@yahoo.com)

**Agus Satmoko Adi**

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) [agussatmokoadi@gmail.com](mailto:agussatmokoadi@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap peran Komisi Pemilihan Umum Raya atau KPUR dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada Pemilu Raya Prodi PPKn Universitas Negeri Surabaya periode 2016-2017 dan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Biddle dan Thomas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KPUR dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan sosialisasi Pemilu Raya meliputi peraturan Pemilu Raya, agenda kegiatan, persyaratan, dan ketentuan serta tata cara dalam memilih. Sosialisasi dilakukan melalui empat media sosial yakni *BBM*, *line*, *whatsapp* dan *facebook*. Partisipasi politik mahasiswa meliputi partisipasi politik aktif yang dipengaruhi faktor kesadaran politik yang tinggi, sosialisasi melalui media sosial dan ajakan teman. Partisipasi pasif dipengaruhi oleh faktor kesadaran politik yang rendah sedangkan golput dipengaruhi oleh faktor sistem politik dan masyarakatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saran dalam penelitian ini yaitu diharapkan KPUR dapat lebih memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang pasif dan golput pada saat Pemilu Raya periode selanjutnya.

**Kata Kunci:** peran KPUR, media sosial, partisipasi politik.

### **Abstract**

The purpose of this research to uncover the role of general election commission highway or KPUR in order to increase political participation students in the Election Raya Prodi PPKn State University Surabaya the period 2016-2017 and to discover factors affecting political participation students. A theory that used in this research is a theory the role of biddle and thomas. Approach research that used in this research is qualitative research methodology descriptive. Technique data collection use observation, interviews and documentation. This research result indicates that the role of KPUR with carrying out their duties by providing socialization Raya covering the Election regulations Raya General Election, activities agenda, the requirements and provisions as well as the procedures for when choosing. Socialization was undertaken through four social media namely *BBM*, *line*, *whatsapp* and *facebook*. Political participation student covering political participation active factor that influenced political awareness high, socialization through social media and solicitation friend. Participation passively affected by a factor of awareness political low while golput influenced by a factor of a political system and the people are not as expected. Advice research is expected KPUR could be more maximize its performance in go upon that no longer students that is passive and golput on Election was Raya the period next.

**Keywords:** the role of KPUR, social media, political participation.

### **PENDAHULUAN**

Prodi PPKn di Universitas Negeri Surabaya merupakan prodi yang bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang baik. Salah satu bentuk mahasiswa prodi PPKn adalah menjalankan kewajiban sebagai warga negara dengan memberikan hak suaranya dalam memilih pada Pemilu. Bentuk adanya aktivitas sosial politik

dilakukan mahasiswa di kampus adalah dengan adanya pemerintahan mahasiswa dimana mahasiswa itu sendiri memiliki peran dan tugas masing-masing sesuai jabatannya. Kegiatan ini memunculkan istilah politik kampus yang didefinisikan politik dan kampus politik dimana terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan mahasiswa untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat demi kepentingan publik dan dilakukan di kampus yang

lahir dari, oleh dan untuk masyarakat kampus. Politik kampus merupakan salah satu bentuk upaya keterlibatan mahasiswa untuk ikut menentukan, merumuskan dan mengontrol segala bentuk kebijakan yang ada di kampus (Ayu, 2013:1-2).

Bentuk kegiatan dari adanya politik kampus adalah dengan adanya Pemilu Raya (Pemilihan Umum Raya) yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Fungsi Pemilu Raya adalah menentukan ketua dan wakil ketua untuk setiap BEM Fakultas, Jurusan, dan Prodi. Selain fungsi tersebut, Pemilu Raya juga berfungsi sebagai media untuk pelaksanaan politik kampus sehingga setiap mahasiswa dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mahasiswa berhak ikut serta menjadi tim sukses dari calon yang akan terpilih menjadi pemimpin. Mahasiswa juga dapat menjadi panitia dalam terlaksananya Pemilu Raya dan berhak menjadi pemilih untuk memilih calon pemimpin yang tepat sesuai dengan harapan.

Prosedur dan ketentuan pelaksanaan Pemilu Raya pada umumnya dilaksanakan sebagaimana pemilihan umum yang ada di masyarakat. Sebelum Pemilu Raya dilakukan, terlebih dahulu dibentuk KPUR atau Komisi Pemilihan Umum Raya. Tidak jauh beda dengan KPU pada saat pemilihan umum di Indonesia, pada KPUR juga melakukan tugas-tugas yang telah diatur sesuai peraturan ORMAWA nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Raya Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya tahun 2016 pada Bab VI Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) Pasal 16 mengenai tugas-tugas KPUR dalam menyelenggarakan Pemilu Raya dari tingkat fakultas hingga jurusan/prodi.

Peraturan ORMAWA Bab VI Pasal 16 menunjukkan bahwa KPUR mengemban amanah untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsinya. Salah satu tugas tersebut pada point b yakni mensosialisasikan Pemilu Raya. Sosialisasi ikut menjadi salah satu faktor dalam menentukan partisipasi politik karena dengan sosialisasi yang dilakukan secara maksimal akan dapat memberikan banyak pengetahuan dan informasi kepada pemilih mengenai Pemilu Raya. Sosialisasi yang dilakukan harus tersampaikan dengan jelas kepada seluruh mahasiswa agar informasi tersebut dapat bermanfaat. Sosialisasi yang dilakukan KPUR antara lain mengenai peraturan Pemilu Raya, agenda kegiatan, persyaratan dan ketentuan (mendaftar sebagai kandidat, seleksi administratif, tes wawancara), kampanye, debat kandidat, tata cara memilih serta surat suara yang sah dan tidak sah.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 dengan Feni Qoriroh mahasiswa PPKn angkatan 2012 kelas C selaku panitia Pemilu Raya pada periode 2014-

2015 mengatakan bahwa sosialisasi dan kegiatan lainnya terkait pelaksanaan Pemilu Raya saat itu dilakukan dengan lokakarya. Lokakarya adalah sosialisasi dengan cara mengumpulkan para PJ/penanggung jawab kelas setiap angkatan serta para anggota lain yang ikut berperan dalam pelaksanaan Pemilu Raya untuk membicarakan, merapatkan dan mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu Raya. PJ/penanggung jawab setiap kelas yang hadir pada saat lokakarya bertugas untuk menyampaikan segala informasi yang diperoleh kepada para mahasiswa terutama di kelasnya masing-masing.

Pernyataan Feni Qoriroh menjelaskan sosialisasi Pemilu Raya pada periode 2014-2015 menggunakan lokakarya. Pada hari yang sama dilakukan wawancara dengan Heru Pristianto selaku panitia Pemilu Raya pada periode 2015-2016. Ia menuturkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pada saat itu melalui lokakarya dan media cetak yang ditempel di mading prodi PPKn. Lokakarya dilakukan hampir sama dengan periode sebelumnya yakni dengan memberikan informasi Pemilu Raya kepada setiap PJ/penanggung jawab kelas setiap angkatan yang kemudian akan disampaikan kepada mahasiswa lainnya. Sosialisasi lain yakni dengan menempel lembarann informasi berisi peraturan mengenai Pemilu Raya yang ditempel di mading prodi PPKn dan di ruangan HMP.

Hasil kinerja KPUR pada periode 2015-2016 diperoleh data dari surat laporan pertanggung jawaban KPUR pada Pemilu Raya Prodi PPKn periode 2015-2016 bahwa masa pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 29 April 2015 di Taman il FISH Unesa terdapat 2 kandidat Kahima dan Wakahima yakni pasangan Firman Budi Pratama, Analisa dan Lastri Winarsih, Luluk Suryati. Terdata belum seratus persen mahasiswa menggunakan hak pilihnya. Hasil pemungutan suara diperoleh data total pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 356 pemilih sekitar 72% dari total pemilih yang tercantum di Data Pemilih Tetap. Perolehan suara terbanyak didapatkan oleh kandidat nomor 2 yakni pasangan Lastri Winarsih dan Luluk Suryati sebesar 191 suara, sedangkan pasangan kandidat no 1 memperoleh suara 148 dan 17 surat suara tidak sah.

Perolehan data awal menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPUR pada periode 2014-2015 dan 2015-2016 masih dilakukan dengan cara yang tergolong tradisional. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap penanggung jawab kelas untuk menyebarkan informasi Pemilu Raya kepada mahasiswa lainnya. Sosialisasi dengan cara seperti ini dianggap tidak efisien oleh karena itu perlu adanya inovasi baru untuk memudahkan KPUR dalam memberikan sosialisasi secara maksimal. Salah satu upaya untuk memberikan sosialisasi dengan praktis

adalah melalui media sosial. Seperti kita ketahui bahwa saat ini media sosial sangat diminati oleh berbagai kalangan terutama bagi mahasiswa.

Perkembangan sistem komunikasi merupakan bagian dari adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bisa berupa alat komunikasi yang sering dijumpai oleh berbagai kalangan masyarakat. Kata komunikasi sering dikenal secara umum dengan komunikasi massa. Komunikasi massa menurut Wright (dalam Severin, 2005:4) adalah “Komunikasi yang diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen dan anonim”, sehingga komunikasi massa dapat menyampaikan pesan secara luas kepada banyak orang. Komunikasi massa dapat dilakukan dan diimplementasikan dengan adanya media massa, salah satu wujud media massa adalah media sosial seperti *BBM*, *line*, *facebook*, *instagram* dan media sosial lainnya.

Menurut Sudibyo, (2004:1) “Media sosial diyakini bukan sekedar medium lalu lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan mampu mempresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya di tingkat lokal maupun global.” Media sosial dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Media sosial merupakan sarana dari adanya media internet yang mencakup segala sesuatu secara luas. Media sosial sebagai tempat atau wadah baru bagi individu untuk bebas berpendapat dan mendapatkan informasi tanpa batas. Berdasarkan latar belakang ini, bisa diasumsikan bahwa media sosial memiliki karakteristik kebebasan dan pengaturan diri sendiri, yang juga merupakan ciri utama demokrasi yang sesungguhnya.

Media sosial merupakan sarana dan alat yang bisa digunakan untuk menerapkan demokrasi. Salah satu sistem demokrasi adalah dengan adanya partisipasi masyarakat. Tidak heran jika media sosial sering digunakan sebagai alat untuk mengeluarkan aspirasi, pendapat, kritikan bagi masyarakat mengenai hal-hal terkait sistem kenegaraan. Memberikan kritikan tentunya dibutuhkan adanya pengetahuan dan ketrampilan. Pengetahuan dan ketrampilan dapat diperoleh dari pendidikan. Berdasarkan alasan tersebut, mahasiswa sebagai peserta didik yang akan siap terjun di lingkungan masyarakat diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan baik akademik maupun non akademik.

Berdasarkan informasi Jakarta Kominfo, Kamis 09 Oktober 2014, Menteri Komunikasi dan Informatika ad-interim yang juga sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, “media massa semakin memiliki peran

secara dinamis dalam proses demokrasi, terutama menjembatani pendapat publik melalui jejaring sosial yang tersebar secara massif.” Sekjen Kemkominfo Suprawoto, Menko Polhukam tersebut memberikan contoh betapa kuatnya media sosial seperti *facebook* dan *twitter* memainkan peran pentingnya dalam kehidupan sosial dan transisi demokrasi di banyak negara. Media massa memberikan ketentuan untuk interaksi dan pertukaran ide yang bebas dan terbuka untuk berbagai ruang publik, ini adalah fitur umum dari sistem demokrasi. (am.bintang.Jakarta.Berita Kementerian)

Pernyataan Menteri POLHUKAM di atas sejalan dengan apa yang dilakukan mahasiswa ketika mereka mengeluarkan pendapat dan mengkritik kebijakan negara yang tidak sesuai menurut anggapan mereka. Mahasiswa merupakan aktor yang berperan dalam dunia politik. Kampus adalah tempat dimana mahasiswa juga diajarkan untuk mengasah kemampuan mereka tidak hanya akademik namun juga non akademik. Kampus sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan dan melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas dalam sosial politik. Misalnya dalam keikutsertaan mahasiswa pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan aktif mengikuti kegiatan keorganisasian intern yang ada di kampus.

Baran dan Davis (2010:326) menjelaskan, “kaitan internet sebagai media demokrasi menjelaskan bahwa internet sebagai wilayah yang paling bebas, paling bising, paling beragam, dan paling interaktif dibanding media komunikasi massa lainnya.” Pendapat tersebut membuktikan bahwa media sosial sebagai salah satu sarana dari internet mampu memberikan kebebasan bagi siapapun terutama mahasiswa untuk ikut berpartisipasi, mengeluarkan pendapat, dan mengkritik. Media sosial memiliki karakteristik kebebasan dan pengaturan diri sendiri, yang juga merupakan ciri utama demokrasi yang sesungguhnya dimana manusia bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengkritik dan dikritik, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Studi awal yang dilakukan pada pelaksanaan Pemilu Raya periode sebelumnya sampai pada periode 2015-2016 menunjukkan bahwa sosialisasi Pemilu Raya membutuhkan cara yang lebih efektif. KPUR memerlukan ruang dimana didalamnya bisa terbentuk wadah bagi publik yakni mahasiswa sebagai pemilih dalam memberikan kritikan, saran, saling *sharing*, bertukar informasi terkait pelaksanaan Pemilu Raya. Jika dikaitkan dengan perkembangan globalisasi maka adanya media sosial merupakan jawaban bagi KPUR dalam menjalankan salah satu tugasnya yakni mensosialisasikan Pemilu Raya kepada mahasiswa. Media sosial menjadi ruang yang kondusif karena tidak rawan konflik sehingga



mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusuhan.

KPUR tidak harus bertatap muka dengan mahasiswa dalam melakukan sosialisasi Pemilu Raya sehingga mempermudah siapa saja untuk memberikan sumbang saran dan kritikan terkait Pemilu Raya. KPUR juga dapat secara langsung menyampaikan sosialisasinya melalui media sosial sehingga dapat menciptakan adanya kedekatan antara KPUR dengan mahasiswa sebagai pemilih selain itu juga dapat menghemat waktu serta tenaga. Sosialisasi Pemilu Raya periode 2016-2017 melalui media sosial dapat menjadi alternatif baru dan diharapkan dapat menjadi wadah yang baik untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa.

Tugas KPUR dalam mensosialisasikan Pemilu Raya melalui media sosial seperti *BBM*, *instagram*, *twitter*, *facebook*, *line* dan lain-lain. Penelitian ini mencoba untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana peran KPUR dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada Pemilu Raya periode 2016-2017 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa. Partisipasi politik yang akan dihasilkan nanti bisa saja aktif, pasif atau bahkan golput. Hal ini juga dapat ditentukan dari bagaimana KPUR dalam menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai dengan fungsi dan peranannya. Latar belakang inilah yang mendasari terbentuknya penelitian dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Raya melalui Media Sosial dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa pada Pemilu Raya Prodi PPKn Unesa Periode 2016-2017”.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran suatu keadaan tertentu secara rinci disertai dengan bukti. Menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dirasa dapat memaparkan masalah dengan jelas, menyeluruh, mendalam dan cocok untuk mendeskripsikan peran KPUR melalui media sosial dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada Pemilihan Umum Raya Prodi PPKn Unesa periode 2016-2017.

Sumber data penelitian merupakan sumber dari mana data penelitian tersebut diperoleh baik melalui benda

gerak, manusia tempat dan hal lain yang dapat menghasilkan perolehan data penelitian. Sumber data dibedakan menjadi dua yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data untuk mendukung sumber data primer. Sumber data primer pada penelitian ini adalah KPUR pada Pemilihan Umum Raya Prodi PPKn Unesa periode 2016-2017. Sumber data sekunder adalah dokumentasi dari media sosial yang digunakan oleh KPUR pada Pemilu Raya.

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian untuk segala aktivitas atau tindakan penelitian dilakukan sehingga merupakan tempat yang akan dipakai untuk mengumpulkan data. Lokasi penelitian ini bertempat di Prodi PPKn Unesa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Jl. Ketintang Surabaya. Alasan memilih lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut; (1) prodi PPKn merupakan salah satu prodi dimana memiliki misi dan visi yang mengedepankan dan menciptakan mahasiswa agar memiliki jiwa nasionalis dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) mahasiswa Prodi PPKn merupakan mahasiswa yang aktif dalam dunia politik walaupun hanya sebatas perpolitikan kampus; (3) banyak mahasiswa Prodi PPKn yang aktif menggunakan media sosial seperti *BBM*, *instagram*, *facebook*, *line*, *whatsapp* dll.

Waktu penelitian merupakan lamanya penelitian yang dilakukan mulai awal penelitian hingga perolehan data penelitian dianggap cukup dalam mendukung hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2016. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2002:90). Informan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini yakni 5 anggota KPUR Prodi PPKn periode 2016-2017 yakni Wafa (Ketua), Sesil (Sekretaris), Zaki (Bendahara), Dini (Anggota) dan Asna (Anggota) serta perwakilan beberapa mahasiswa dari angkatan 2011 sampai 2015. Informan mahasiswa digunakan sebagai pendukung untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat dalam mengolah data yang diperoleh dari KPUR.

Fokus penelitian merupakan batasan masalah pada penelitian yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2012:207). Fokus penelitian merupakan objek kajian yang menjadi perhatian pada penelitian ini sehingga yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah terkait bagaimana peran KPUR. Peran KPUR disini meliputi tugasnya dalam melakukan sosialisasi yang

dilakukan pada saat sebelum PEMIRA hingga selesainya PEMIRA. Sosialisasi KPUR antara lain peraturan Pemilu Raya, agenda kegiatan, persyaratan dan ketentuan (daftar kandidat, seleksi administratif, tes wawancara, debat kandidat dan kampanye) serta tata cara dalam memilih. Tugas KPUR tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial sehingga nantinya dapat diketahui media sosial mana yang lebih banyak diminati oleh mahasiswa. Melalui data tersebut dapat dilihat bagaimana peran KPUR dan bagaimana respon dari mahasiswa.

Instrumen pengumpulan data merupakan bagian dari penelitian yang digunakan untuk menyusun rancangan dalam memperoleh dan mendukung data penelitian. Instrumen yang diperlukan adalah instrumen wawancara dimana terdapat pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang akan dilakukan nantinya. Instrumen tersebut difokuskan pada bagaimana sosialisasi Pemilu Raya yang dilakukan KPUR melalui media sosial. Sosialisasi ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum Pemilu Raya dimulai sampai dengan selesai. Hasil akhir nantinya akan diketahui bagaimana bentuk partisipasi politik dari mahasiswa PPKn kemudian dapat dianalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa.

Teknik pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data penelitian ini mengacu pada model analisis Hubberman dan Miles yang dilakukan dengan pertama pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah awal dalam pengumpulan data adalah menentukan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam mendukung pengumpulan data misalnya menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu, melakukan pengamatan pada kegiatan Pemilu Raya Prodi PPKn dari tahap awal hingga akhir. Mengumpulkan dokumen-dokumen tentang KPUR dan dokumen lain yang mendukung pengumpulan data penelitian. Berdasarkan teknik-teknik yang digunakan dapat menghasilkan berbagai informasi terkait peran KPUR melalui media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa.

Langkah kedua penyederhanaan data (reduksi data) Menurut Miles dan Hubberman (1992:16) reduksi data merupakan bagian dari analisis data yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari penelitian yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dipakai untuk memilih data mana yang dipakai dan data mana yang tidak diperlukan. Reduksi data pada penelitian ini meliputi indikator sosialisasi yang dilakukan KPUR melalui media sosial. Ketiga penyajian data, berupa teks naratif untuk mendeskripsikan hasil dan

informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data ini menceritakan dengan fokus bagaimana, mengapa, apa yang dilakukan KPUR dalam melakukan sosialisasi Pemilu Raya melalui media sosial dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada Pemilu Raya Prodi PPKn Unesa periode 2016-2017.

Langkah keempat kegiatan penyimpulan data atau penarikan kesimpulan menjadi alur terakhir dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan, direduksi, dan disajikan perlu juga diverifikasi misalnya dengan meninjau ulang catatan lapangan yang tersusun (Miles dan Hubberman, 1992:19). Verifikasi pada penelitian ini mengenai sosialisasi Pemilu Raya oleh KPUR melalui media sosial, bagaimana partisipasi politik mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut kemudian diverifikasi dengan meninjau ulang dengan catatan lapangan yang sudah tersusun. Teknik Triangulasi terdiri dari empat macam antara lain dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori (Denzim dalam moleong, 2005:330). Teknik triangulasi terbagi dalam 4 hal yakni teori, subjek, metode dan sumber. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi memanfaatkan sumber dan metode.

Pemanfaatan sumber berarti menggunakan berbagai sumber data yaitu semua anggota KPUR pada pemilihan umum raya prodi PPKn karena dapat dijadikan sumber data manusia yang mampu memberikan informasi terkait dengan peran media sosial dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada Pemilu Raya periode 2016-2017. Kedua adalah pemanfaatan metode yakni dengan observasi dan wawancara. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara nantinya akan dikroscekkan dengan metode observasi sehingga dapat diketahui apakah data dari hasil wawancara sesuai dengan observasi atau tidak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berawal dari tujuan Himpunan Mahasiswa Prodi PPKn pada masa bakti 2015-2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya untuk melanjutkan dan melaksanakan perubahan yang lebih baik pada prodi PPKn maka perlu adanya regenerasi kepengurusan. Cara yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Pemilu Raya Prodi PPKn periode 2016-2017 dan sebagai sarana mahasiswa untuk berpesta demokrasi. Himpunan Mahasiswa Prodi PPKn masa bakti 2015-2016 membentuk badan independent yaitu Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) untuk pelaksanaan Pemilu Raya Prodi.

Komisi Pemilu Raya atau KPUR berperan sebagai lembaga pelaksana kegiatan pemilu di tingkat Prodi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dibentuknya KPUR akan mengantarkan proses pemilihan pemimpin Organisasi Kemahasiswaan Prodi

PPKn Jurusan PMP-KN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Menurut Peraturan ORMAWA nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Raya Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2016 pada Bab VI Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) Pasal 16 menjabarkan mengenai tugas KPUR dalam menyelenggarakan Pemilu Raya dari tingkat fakultas hingga jurusan/prodi yakni meliputi; (1) merencanakan dan menetapkan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Raya; (2) menyosialisasikan pemilu; (3) membentuk dan menetapkan PPS; (4) menyeleksi, mengesahkan, dan menetapkan calon Kandidat Ketua dan Wakil Ketua BEM, Ketua dan Wakil Ketua HM J/P, dan anggota DPM; (5) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua alur pelaksanaan Pemilu Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku; (6) melakukan evaluasi dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilu Raya kepada dekan; (7) melaporkan hasil Pemilu Raya FISH Unesa DEKAN.

Tugas selanjutnya dilanjutkan sebagai berikut; (8) mendata mahasiswa sebagai pemilih; (9) mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT); (10) melakukan rekapitulasi ulang surat suara pemilihan Ketua dan wakil Ketua BEM, Ketua dan Wakil Ketua HM J/P, dan anggota DPM FISH UNESA dari hasil rekapitulasi PPS; (11) menindaklanjuti temuan sengketa dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilanjutkan ke struktural Ormawa yang lebih tinggi; (12) memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan Pemilu Raya; (13) menyiapkan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Raya; (14) berkoordinasi dengan Panwaslu dalam penyelenggaraan Pemilu Raya; (15) melakukan evaluasi setiap akhir kegiatan bersama Panwaslu dan memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan Pemilu Raya. Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai peran KPUR melalui media sosial dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada Pemilu Raya prodi PPKn Unesa periode 2016-2017. KPUR melakukan sosialisasi meliputi peraturan Pemilu Raya, agenda kegiatan, persyaratan dan ketentuan (daftar kandidat, seleksi administratif, tes wawancara, debat kandidat dan kampanye) serta tata cara dalam memilih.

Sosialisasi yang pertama adalah mengenai Peraturan Pemilu Raya. Peraturan Pemilu Raya merupakan pedoman dalam menjalankan pelaksanaan Pemilu Raya yang berisi Undang-Undang dan sudah ditentukan sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa/DPM kemudian Komisi Pemilihan Umum Raya/KPUR diberikan wewenang untuk menambah aturan tersebut apabila memang diperlukan adanya aturan, persyaratan

dan ketentuan yang harus ditambahkan. Peraturan, ketentuan dan persyaratan ini dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan Pemilu Raya baik untuk KPUR maupun para calon kandidat, tim sukses dan mahasiswa sebagai pemilih pada saat Pemilihan Umum Raya. Penting bagi semua pihak mengetahui peraturan ini oleh karena itu KPUR wajib mensosialisasikannya kepada seluruh mahasiswa.

Wawancara yang pertama dilakukan pada hari Senin 11 April 2016 dengan Husnul Wafa sebagai ketua KPUR. Ia memaparkan tentang tugasnya dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan Pemilu Raya. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui media sosial *BBM* dengan membuat *PM*. Peraturan Pemilu Raya yang Wafa sosialisasikan meliputi aturan penyetoran calon hingga, persyaratan calon dan aturan Undang-Undang untuk Pemilu Raya. Berikut pernyataan Wafa:

“Iya mbak, saya melakukan sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan PEMIRA. Tentunya yang pertama itu mengenai peraturan PEMIRA lah dari penyetoran calon hingga persyaratan calon dan aturan pas apa itu (sambil menggerakkan tangan) undang-undang untuk PEMIRA, tetapi kita dari KPUR Prodi cuman meneruskan dari KPU Fakultas. Sosialisasi itu saya buat PM di *BBM* mbak” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Sependapat dengan pernyataan Wafa, 2 anggota KPUR yakni Sesil dan Asna menambah bahwa mereka memberikan sosialisasi mengenai peraturan Pemilu Raya yang sudah dirapatkan sebelumnya oleh seluruh anggota KPUR. Ketiga anggota KPUR ini memberikan sosialisasi mengenai peraturan Pemilu Raya melalui media sosial *BBM*.

Sosialisasi kedua yakni mengenai agenda kegiatan yang dirancang oleh KPUR sesuai dengan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan. Tahapan kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 18 Maret 2016 yang meliputi pendaftaran bakal calon kandidat Kahima dan Wakahima serta PPS pada tanggal 10-11 Maret 2016, 11 Maret 2011 dilanjutkan seleksi administratif, tes wawancara bakal calon kandidat dan penetapan calon Kahima dan Wakahima PPKn. Tanggal 12-14 Maret 2016 kegiatan masa kampanye, 15 Maret 2016 kegiatan debat kandidat, 16 Maret 2016 masa tenang, 17 Maret 2016 pemungutan suara dan perhitungan suara kemudian 18 Maret 2016 penetapan Kahima dan Wakahima terpilih. Berikut salah satu hasil pernyataan KPUR terkait sosialisasi mengenai agenda kegiatan:

“Kalo aku sih mbak, sosialisasi pake medsos kayak *BBM* lewat *PM* jadi kalo lewat *PM* itu setelah peraturan PEMIRA kemudian terkait adanya perubahan jadwal wawancara calon kandidat, semua udah tau. Jadi awalnya aku



*update* tentang jadwal agenda kegiatan itu mbak di *BBM*. Kan aku juga punya pin calon-calonnya, timses-timsesnya mbak jadi kalo ada perubahan-perubahan apa tentang PEMIRA, ada perubahan-perubahan jadwal, ada apa ada apa seperti itu semua udah pada tau. Anak-anak juga udah pada tau siapa calon-calonnya. Untuk masyarakat PPKn itu saya sosialisasi media sosialnya lewat *facebook*. Jadi saya *sharing* di grup PPKn sama grup kelas kemudian kalo saya pasang *DP* itu mesti dibuat *DP* juga sama anak-anak. Trus kalo misalnya sosialisasi lewat ngomong di setiap kelas-kelas ya udah gak efisien mbak” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Sesil sebagai sekretaris KPUR menyatakan bahwa ia melakukan sosialisasi tentang agenda kegiatan Pemilu Raya melalui *BBM*. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara membuat status atau *PM* yang berisi agenda kegiatan. Sesil selalu memperbarui informasi apabila terjadi perubahan jadwal kegiatan sehingga mahasiswa selalu mendapat informasi terbaru dari sosialisasi yang dilakukan Sesil melalui media sosial. Sesil menyatakan bahwa mahasiswa tertarik dengan apa yang disosialisasikannya karena kebanyakan dari mahasiswa mencontoh gambar atau informasi untuk dijadikan gambar profil dan status di media sosial masing-masing mahasiswa. Mahasiswa juga sering merespon sosialisasi yang dilakukan Sesil dengan bertanya secara langsung melalui media sosial untuk memperjelas tentang agenda kegiatan Pemilu Raya. Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh dua anggota KPUR yakni Zaki dan Dini.

Sosialisasi yang ketiga mengenai persyaratan dan ketentuan Pemilu Raya yang meliputi pendaftaran kandidat, seleksi administratif, tes wawancara, debat kandidat, dan masa kampanye. Persyaratan dan ketentuan ini harus diikuti oleh pihak yang terlibat karena apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi. Alasan inilah yang mendasari perlunya sosialisasi secara jelas mengenai persyaratan dan ketentuan tersebut. Berikut ini salah satu pemaparan KPUR yang mensosialisasikan persyaratan dan ketentuan dari lima hal penting dalam Pemilu Raya:

“...kalau yang *BC-BC*nya terkait informasi seperti besok ada kegiatan debat, kemudian pemberitahuan terakhir untuk penyetoran calon-calon Kahima dan Wakahima seperti itu. Lainnya itu tentang syarat calon sama batas terakhir pendaftaran trus setelah pendaftaran bakal calon ada SK dari... ohh yang pertama SK KPU, SK PPS dan lain-lain, terus kemudian aturan-aturan eee... keputusan dan ketetapan KPU mulai dari ketetapan calon, ketetapan peraturan alat peraga dan lain-lain” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa menyatakan bahwa ia melakukan sosialisasi mengenai syarat dalam menjadi calon kandidat, batas

terakhir pendaftaran menjadi calon kandidat, selain itu mengenai surat ketetapan Komisi Pemilihan Umum, surat ketetapan Panitia Perhitungan Suara, aturan dan ketetapan calon, ketetapan peraturan alat peraga dan lain-lain. Sosialisasi mengenai persyaratan dan ketentuan ini diberitahukan melalui *BBM* dengan cara mem*BC/Broadcast* ke semua kontak *BBM* Wafa. Zaki dan Dini juga menambahkan mereka memberikan sosialisasi persyaratan dan ketentuan melalui *PM* di *BBM*.

Sosialisasi yang keempat mengenai tata cara dalam memilih merupakan faktor penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Perlunya pemahaman mengenai tata cara dalam memilih pemimpin menjadi penentu untuk memperhitungkan hasil perolehan suara dan memperkecil kesalahan pada saat perhitungan surat suara. Berikut ini pernyataan Dini yang melakukan sosialisasi melalui media sosial terkait tata cara dalam memilih pada saat Pemilu Raya:

“Ya... kan ada tata cara pas pemilihan mbak itu kita punya filenya kan tentang tata cara pemilihan, nah itu saya lihat kemudian saya sosialisasikan cara memilih yang benar seperti ini, terus ada gimana surat suara yang sah sama tidak, cara nyoblosnya bagaimana, nah itu saya sosialisasikan saya beritahukan ke temen-temen di *BBM*...” (wawancara: Selasa, 10 Mei 2016).

Dini menjelaskan ia melakukan sosialisasi mengenai tata cara dalam memilih. Selain tata cara dalam memilih, Dini juga memberikan sosialisasi bagaimana surat suara yang sah dan tidak sah. Sosialisasi mengenai tata cara dalam memilih ia lakukan melalui media sosial *BBM*. Asna sebagai anggota KPUR juga menambahkan bahwa ia ikut mengingatkan kepada mahasiswa untuk tidak salah dalam memasukkan surat suara ke dalam bilik/ kotak surat suara. Selain itu Asna menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat memilih. Asna memberikan sosialisasi mengenai tata cara dalam memilih melalui media sosial *BBM* dengan mengganti foto profil dan *PM* tentang tata cara memilih.

Media sosial adalah sarana atau wadah yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan interaksi baik dalam bentuk saling *sharing*, berpartisipasi maupun yang lainnya. Berbagai manfaat dari adanya media sosial inilah yang mendasari Komisi Pemilihan Umum Raya melakukan sosialisasi Pemilu Raya melalui media sosial. Berikut ini empat media sosial yang digunakan KPUR untuk melakukan sosialisasi Pemilu Raya sesuai dengan tingkatan perannya dari media sosial yang paling banyak digunakan dan diminati sampai ke yang tidak diminati yakni; (1) *BBM*; (2) *line*; (3) *whatsapp* dan (4) *facebook*. Observasi awal yang dilakukan membuktikan bahwa hampir sebagian besar mahasiswa PPKn angkatan 2012 sampai dengan 2015 memiliki media sosial *BBM* di

*handphonenya*. Hal ini menjadi alasan bagi KPUR untuk melakukan sosialisasi Pemilu Raya melalui *BBM*. Berikut ini adalah pemaparan dari KPUR yang menyatakan bahwa *BBM* merupakan media sosial yang paling berperan dalam melakukan sosialisasi:

“...kebanyakan itu di *BBM* mbak. Kebanyakan teman-teman dikontak *BBM* itu yang memakai *DP* yang dibuat oleh KPUR seperti gambar slogan ayo memilih dan kemudian beberapa mahasiswa yang lainnya cenderung memakai calon yang didukungnya untuk dibuat *DP*” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa menjelaskan bahwa mahasiswa paling banyak merespon sosialisasi melalui *BBM*. Respon tersebut dimunculkan dengan banyaknya mahasiswa yang mengganti *DP*/foto profil dengan gambar yang disosialisasikan Wafa seperti gambar slogan “ayo memilih”, sedangkan mahasiswa lainnya cenderung menggunakan foto profil calon kandidat yang didukungnya. Mahasiswa merespon dengan mengomentari langsung melalui *BBM* dan bertanya lebih jelas mengenai pelaksanaan Pemilu Raya. Sesil, Dini dan Asna juga menyampaikan bahwa sosialisasi yang paling banyak direspon oleh mahasiswa adalah melalui *BBM* karena mahasiswa banyak yang ikut memberikan komentar dan aktif bertanya di *BBM* apabila ada sosialisasi yang belum dipahami dengan jelas.

Media sosial kedua adalah *line* merupakan media sosial yang tidak jauh berbeda dengan *BBM*. *line* memberikan sarana bagi penggunanya untuk mengirim pesan secara pribadi maupun ke banyak orang. Beberapa dari anggota KPUR melakukan sosialisasi Pemilu Raya melalui media sosial *line*. Sosialisasi itu dilakukan dengan membagikan informasi maupun gambar ke dalam grup kelas sehingga informasi yang diberikan dapat tersebar ke seluruh mahasiswa yang ikut ke dalam grup kelas tersebut. Berikut ini pernyataan dari Wafa yang menjelaskan menggunakan *line* untuk mensosialisasikan Pemilu Raya:

“Kalau yang *WA* dan *Line* kebetulan saya punya dari teman-teman yang kebanyakan dari angkatan saya saja. Jadi di *Line* itu temen-temen komentar tentang apa yang saya tampilkan di *Line* tapi gak keterusan soalnya kebanyakan itu di *BBM* mbak...” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa menjelaskan ia memiliki kontak teman-teman satu angkatan di akun *line* pribadinya sehingga ia melakukan sosialisasi melalui *line* agar teman-temannya dapat mengetahui informasi mengenai Pemilu Raya. Beberapa dari mahasiswa tertarik dengan sosialisasi melalui *line* namun Wafa menjelaskan bahwa hanya beberapa saja mahasiswa yang merespon sosialisasi yang ia lakukan di *line* dan respon mahasiswa tidak berkelanjutan karena sebagian besar mahasiswa lebih tertarik mengomentari sosialisasi yang dilakukan

melalui *BBM*. Sesil menambahkan bahwa sosialisasi melalui media sosial lebih mudah dan efisien. Informasi yang disampaikan dapat tersebar dengan mudah dan menjadi salah satu alternatif baru agar mahasiswa dapat lebih tertarik membaca sosialisasi yang diberikan oleh KPUR. Sesil menjelaskan bahwa ia memberikan sosialisasi melalui *line* grup kelas yang berisi rekan-rekan kelasnya sehingga melalui *line* mahasiswa dapat mengetahui apa yang disosialisasikan oleh Sesil.

Media sosial ketiga adalah *whatsapp* merupakan media sosial yang dibuat dengan menggunakan nomer *handphone* penggunanya. Beberapa anggota dari KPUR melakukan sosialisasi Pemilu Raya melalui *whatsapp* namun sosialisasi melalui *whatsapp* tidak terlalu berperan karena hanya sedikit mahasiswa yang merespon sosialisasi melalui *whatsapp* sehingga KPUR tidak meneruskan sosialisasi melalui *whatsapp*. Berikut salah satu pernyataan KPUR yang memberikan sosialisasi melalui *whatsapp*:

“Kalau yang *WA* dan *Line* kebetulan saya punya dari teman-teman yang kebanyakan dari angkatan saya saja. Jadi di *Line* itu temen-temen komentar tentang apa yang saya tampilkan di *Line* tapi gak keterusan soalnya kebanyakan itu di *BBM* mbak” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Pernyataan Wafa menjelaskan tidak jauh berbeda dengan caranya mensosialisasikan melalui *line*, sosialisasi yang ia lakukan melalui *whatsapp* juga dibagikan ke dalam akun *whatsapp* grup kelas sehingga informasi dan gambar yang Wafa berikan dapat tersebar dan diketahui oleh mahasiswa yang mengikuti grup kelas di *whatsapp* tersebut. Jika dibandingkan sosialisasi Pemilu Raya dengan menggunakan media sosial lainnya, *whatsapp* menjadi salah satu media yang tidak berperan banyak dalam sosialisasi Pemilu Raya yang dilakukan KPUR. Alasannya sebagian besar mahasiswa tidak tertarik dan hanya sedikit saja yang merespon sosialisasi yang diberikan melalui media sosial *whatsapp*.

Keempat adalah *facebook* merupakan salah satu media sosial yang paling populer dan paling umum digunakan oleh berbagai kalangan. Jangkauan *facebook* jauh lebih luas jika dibandingkan dengan media sosial seperti *BBM*, *line* dan *whatsapp*. KPUR ikut menggunakan peran media sosial dalam melakukan sosialisasi, namun dengan berkembangnya zaman menyebabkan *facebook* tidak terlalu banyak diminati oleh mahasiswa. Mahasiswa lebih berminat membaca dan merespon sosialisasi Pemilu Raya melalui media sosial lainnya dibandingkan dengan *facebook*. Berikut ini pernyataan dari KPUR mengenai sosialisasi yang mereka lakukan melalui *facebook*:



“Kan aku juga punya pin calon-calonnya, timses-timsesnya mbak jadi kalo ada perubahan-perubahan apa tentang PEMIRA, ada perubahan-perubahan jadwal, ada apa ada apa seperti itu semua udah pada tau. Anak-anak juga udah pada tau siapa calon-calonnya. Untuk masyarakat PPKn itu saya sosialisasi media sosialnya lewat *facebook*” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Sesil menyatakan bahwa ia melakukan sosialisasi Pemilu Raya salah satunya melalui *facebook*. Sesil melakukan sosialisasi melalui *facebook* untuk membagikan informasi kepada masyarakat PPKn sehingga sosialisasi tersebut dapat dilihat secara lebih umum. Namun berdasarkan observasi, *facebook* tidak lagi menjadi media sosial yang banyak diminati oleh mahasiswa karena memang sebagian besar mahasiswa lebih tertarik dengan media sosial lainnya yang lebih baru seperti *BBM*. Mahasiswa terlihat tidak merespon apa yang disosialisasikan KPUR melalui *facebook* sehingga sosialisasi melalui *facebook* hanya sebatas pada awal kali pelaksanaan kegiatan saja.

Banyak hal yang menjadi faktor dalam mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa. Beberapa faktor yang dihasilkan menjadi salah satu penentu dalam tinggi rendahnya partisipasi politik. Apabila partisipasi politik tinggi maka dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya cenderung berpartisipasi politik aktif namun jika sebaliknya maka dapat dikatakan masyarakatnya cenderung berpartisipasi politik pasif bahkan sampai memilih untuk golput. Pada penelitian ini terdapat tiga partisipasi politik mahasiswa yakni partisipasi politik aktif, pasif dan golput. Partisipasi politik aktif mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut; (1) kesadaran politik tinggi; (2) sosialisasi melalui media sosial; (3) ajakan teman. Kesadaran politik tinggi dibuktikan dengan sebagian besar mahasiswa angkatan 2013, 2014, dan 2015 memiliki kesadaran politik yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan suara pada Pemilu Raya yang mencapai 365 surat suara, dan 8 surat suara tidak sah. Jika dipresentase hampir 80% mahasiswa ikut memberikan hak suaranya dalam memilih calon Kahima dan Wakahima Prodi PPKn pada saat Pemilu Raya tanggal 17 Maret 2016. Data lain ditambahkan dengan penuturan Wafa, berikut pernyataan Wafa:

“Kalau pas hari H yang nyoblos untuk tahun ini cukup banyak sekitar hampir 80% jadi banyak yang nyoblos daripada yang tidak. Untuk angkatan 2015 hampir semuanya, 2014 juga dan 2013 juga hampir semuanya mencoblos mbak...” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa mengatakan bahwa hampir semua mahasiswa angkatan 2013, 2014, dan 2015 ikut memberikan hak pilihnya pada saat Pemilu Raya. Dari data tersebut

diketahui bahwa mahasiswa angkatan 2013, 2014, dan 2015 memiliki kesadaran politik yang tinggi. Tidak hanya memberikan hak suara mereka pada saat masa pencoblosan, mahasiswa angkatan 2013, 2014, dan 2015 juga aktif dalam kegiatan Pemilu Raya mulai 10 Maret sampai dengan 18 Maret 2016. Berikut pernyataan Wafa yang membuktikan bahwa mahasiswa aktif dalam beberapa kegiatan Pemilu Raya:

“Lumayan kok mbak, ada di beberapa kegiatan misalnya untuk kegiatan pelaksanaan debat kemaren kita ngumpulin massa cukup lumayan banyak massanya mbak, jadi dari timsesnya ada dan dari mahasiswa biasa banyak yang datang. Debat kemaren yang datang didominasi angkatan 2014 dan 2015 mbak. Itu saya mengajaknya karena jadwal keseluruhan sudah ditempel di mading HMP jadi mereka semua sudah tau mbak dan saya ajak itu mereka banyak yang datang” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa menjelaskan banyak mahasiswa yang ikut aktif dalam kegiatan Pemilu Raya misalnya pada kegiatan debat yang berlangsung pada hari Selasa, 15 Maret 2016. Banyak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan debat tersebut dan dihadiri oleh tim sukses dari beberapa calon kandidat serta mahasiswa biasa. Wafa menambahkan bahwa mahasiswa yang datang didominasi oleh angkatan 2014 dan 2015. Sesil dan Zaki membenarkan penuturan Wafa bahwa banyak dari rekan-rekannya yang ikut datang pada saat kegiatan debat. Dini juga menambahkan bahwa rekan-rekan seangkatannya hampir sebagian besar telah memiliki kandidat yang akan dipilih.

Kedua adalah sosialisasi Pemilu Raya melalui media sosial. Sebagian besar warga PPKn mendapat informasi terkait Pemilu Raya melalui media sosial seperti *BBM*, *line*, *whatsapp* dan *facebook*. Berikut ini pernyataan dari KPUR:

“Pas pelaksanaan Hari H itu sempet juga saya update di media sosial *BBM* membuat *PM* tentang lokasi dan waktu pelaksanaan debat dibuka dan ditutup jam segini. Kebanyakan teman-teman dikontak *BBM* itu yang memakai *DP* yang dibuat oleh KPUR seperti gambar slogan ayo memilih dan kemudian beberapa mahasiswa yang lainnya cenderung memakai calon yang didukungnya untuk dibuat *DP*” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa menyatakan ia memberikan sosialisasi untuk mengingatkan kepada mahasiswa agar ikut hadir dalam kegiatan debat. Wafa mensosialisasikan waktu dan tempat dilaksanakannya kegiatan debat melalui *BBM* dan terbukti setelah Wafa memberikan sosialisasi, banyak mahasiswa yang ikut hadir dalam kegiatan debat tersebut. Selain itu Wafa mengunggah gambar melalui *line* dan *BBM* tentang slogan “ayo memilih” yang dibuatnya kemudian mahasiswa PPKn lainnya ikut mengcopy

gambar tersebut untuk dijadikan *DP* (foto profil *BBM*) mereka dan disambung dengan status yang dibuat mahasiswa tentang Pemilu Raya sehingga apa yang Wafa sosialisasikan menarik mahasiswa lainnya untuk antusias mengikuti apa yang disosialisasikan Wafa.

Sesil menambahkan bahwa mahasiswa *exited* dengan apa yang ia sosialisasikan melalui grup di *BBM*. Ia mengingatkan kepada mahasiswa untuk tidak lupa mencoblos dan memberikan hak suara mereka saat pemilihan nanti, mahasiswa secara langsung merespon dengan berbagai bentuk komentar dan mengingatkan kepada antar teman untuk jangan sampai melakukan golput. Asna juga menuturkan bahwa setelah ia memberikan informasi terkait kegiatan debat, sebagian besar mahasiswa ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut bahkan mahasiswa yang hadir melebihi kapasitas ruangan. Asna juga mengatakan bahwa dari banyaknya mahasiswa yang aktif dalam kegiatan Pemilu Raya membuktikan bahwa sosialisasi yang ia lakukan sudah cukup jelas. Penuturan anggota KPUR diketahui bahwa sosialisasi Pemilu Raya yang dilakukan KPUR melalui media sosial ikut menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa.

Bukti lain yang menguatkan bahwa sosialisasi melalui media sosial dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa adalah dengan sedikitnya jumlah surat suara tidak sah pada saat Pemilu Raya. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban KPUR, menjelaskan hanya 8 surat suara tidak sah, hal ini membuktikan sosialisasi yang dilakukan KPUR sudah cukup maksimal. KPUR memberikan sosialisasi melalui media sosial tentang tata cara bagaimana surat suara yang sah dan tidak sah dan beberapa mahasiswa yang tidak paham bertanya secara langsung kepada para KPUR melalui media sosial. Hal ini membuktikan adanya sosialisasi melalui media sosial memunculkan daya tarik warga PPKn lainnya untuk ikut aktif di media sosial sehingga mendukung meningkatnya partisipasi politik mahasiswa pada PEMIRA Prodi PPKn periode 2016-2017.

Ketiga adalah ajakan teman. Terdapat beberapa tim sukses dari setiap calon disetiap angkatan yang bertugas untuk mencari pendukung dalam memilih calon yang didukungnya. Berbagai macam cara dilakukan untuk mengajak warga PPKn memilih calon-calon kandidat tertentu salah satunya menghubungi setiap mahasiswa melalui media sosial maupun berbicara secara langsung. Pernyataan Dini menjelaskan bahwa di dalam kelasnya sudah terdapat beberapa tim sukses yang sudah menghegemoni rekan-rekan kelasnya untuk memilih calon-calon tertentu. Berikut pernyataan Dini:

“Ada mbak, ya kebanyakan itu dari teman-teman di kelas saya sendiri itu kan sudah punya pilihan

masing-masing ya mbak, nah kebanyakan teman-teman saya itu juga jadi tim sukses dari beberapa calon kandidat jadi gak hanya di media sosial mereka ramai mengunggulkan kandidatnya tapi di kenyataannya itu di kelas mereka kayak saling mempengaruhi gitu kayak ayo pilih ini aja rekk jangan pilih ini, kayak gitu-gitu terus mencari pendukung biar yang milih kandidatnya makin banyak” (wawancara: Selasa, 10 Mei 2016).

Dini menyatakan bahwa mahasiswa angkatan 2014 sangat aktif dalam mengkampanyekan calon kandidat pilihannya kepada antar teman, sehingga adanya saling mengunggulkan visi dan misi serta kelebihan calon kandidatnya agar dapat mempengaruhi teman-teman yang lainnya untuk ikut memilih calon kandidat yang sama. Seseorang yang ragu untuk menentukan pilihan kemudian dengan ajakan teman serta pengaruh dari teman untuk memilih kandidat yang diusungnya, bukan tidak mungkin mereka tidak terpengaruh. Berdasarkan penelitian di dalam kelas terdapat dua kubu yang berbeda dikarenakan memilih calon kandidat yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa dalam setiap kelas sudah dapat mempengaruhi mahasiswa untuk berpartisipasi politik terutama dalam memilih. Rasa percaya terhadap teman menyebabkan seseorang menuruti dan mengikuti apa yang disarankan oleh teman termasuk dalam hal menentukan pilihan calon Kahima dan Wakahima pada Pemilu Raya Prodi PPKn periode 2016-2017.

Partisipasi politik pasif menurut Ramlan Surbakti merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Sehingga seseorang yang berpartisipasi politik pasif cenderung diam dan hanya menuruti saja aturan pemerintah. Walaupun memang mereka yang tergolong dalam partisipasi politik pasif ikut memberikan hak suaranya dalam memilih pemimpin namun mereka tidak menyadari pentingnya partisipasi yang mereka lakukan. Beberapa alasan menjadi faktor dalam mempengaruhi partisipasi politik pasif mahasiswa PPKn Unesa. Salah satu faktor yang menyebabkan mahasiswa berpartisipasi politik pasif adalah kesadaran politik yang rendah. Mahasiswa yang berpartisipasi politik pasif merasa bahwa Pemilu Raya tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupannya sehingga mahasiswa cenderung diam saja. Mereka ikut memberikan hak suara mereka dalam memilih namun mereka tidak aktif dalam memberikan kritikan atau pendapat mengenai aturan pemerintah seperti misalnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Raya. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa mahasiswa yang tidak ikut aktif merespon sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Raya melalui media sosial. Beberapa mahasiswa



yang berpartisipasi politik pasif kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa angkatan 2012.

Beberapa alasan mahasiswa angkatan 2011 dan 2012 memiliki kesadaran politik rendah karena alasan-alasan sebagai berikut; (1) angkatan 2011 dan 2012 cenderung lebih fokus dengan skripsi yang belum terselesaikan; (2) beberapa dari mahasiswa angkatan 2012 dan 2011 sudah bekerja dan sibuk dengan pekerjaannya; (3) mahasiswa angkatan 2011 dan 2012 sebagian besar sudah tidak mengikuti perkuliahan sehingga jarang untuk ke kampus; (4) angkatan 2012 dan 2011 menganggap adanya PEMIRA prodi PPKn sudah tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Wafa menjelaskan bahwa terdapat mahasiswa yang berpartisipasi politik pasif, hal ini dimunculkan baik dalam media sosial maupun dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu Raya, berikut pernyataan Wafa:

“Per angkatan ada mbak, yang angkatan 2013 dikit gak begitu banyak yang update kalo dibandingin sama angkatan 2014 2015 udah cukup banyak. Kalo yang 2014-2015 itu hampir semua sering update PEMIRA tapi kalo angkatan 2013 itu sebagian besar memang memasang DP atau PM tapi ada juga teman saya yang tidak ikut update” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa menjelaskan bahwa angkatan 2013 lebih sedikit yang mengupdate kegiatan Pemilu Raya. Beberapa dari mereka memang terlihat sering mengunggah gambar atau status tentang Pemilu Raya namun beberapa dari angkatan 2013 juga terlihat tidak ikut mengupdate. Sebaliknya untuk angkatan 2014 dan 2015 hampir semua mahasiswanya mengupdate kegiatan Pemilu Raya melalui media sosial. Wafa melanjutkan pernyataannya sebagai berikut:

“Kalo yang angkatan 2012 sedikit mbak yang update soal PEMIRA gitu, mungkin hanya kakak-kakak angkatan yang memang dulunya pernah aktif di organisasi atau masih aktif di organisasi, tapi bisa dihitung jari kalo yang masih update mbak” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa menambahkan bahwa untuk mahasiswa PPKn angkatan 2012 sedikit sekali yang mengupdate kegiatan Pemilu Raya. Adapun yang mengupdate namun dapat dihitung dengan jari sehingga mahasiswa PPKn angkatan 2012 cenderung pasif dalam mengikuti pelaksanaan Pemilu Raya. Wafa berpendapat mengenai alasan mahasiswa angkatan 2012 banyak yang memilih untuk pasif, berikut pemaparannya:

“Mungkin juga alasannya karena mereka sudah bosan dan sudah banyak yang fokus sama skripsi atau ada yang kerja jadi untuk update-update soal PEMIRA mungkin sudah pada sibuk mbak. Apalagi yang angkatan 2011 mbak mungkin hanya 1, 2 orang yang update itupun pas mau

pelaksanaan pemilu mbak jadi sesekali saja” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa menjelaskan bahwa kemungkinan mahasiswa PPKn angkatan 2012 memiliki rasa bosan dengan sistem politik kampus, selain itu mahasiswa angkatan 2012 cenderung lebih memilih untuk fokus pada skripsi dan pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan sehingga mereka cenderung sibuk dengan urusannya daripada mengupdate kegiatan Pemilu Raya. Wafa menambahi selain angkatan 2012, mahasiswa PPKn angkatan 2011 juga terlihat pasif dan tidak mengikuti kegiatan Pemilu Raya. Pernyataan lain disampaikan oleh Sesiil, berikut ini pernyataannya:

“Yang masih sering saya lihat sih itu mbak angkatannya mas Wafa, terus sama temen-temennya mbak Dini, kalo untuk angkatannya mbak Altra apalagi yang sebelum-sebelumnya itu saya jarang mbak lihat mereka ikut aktif di kegiatan awal sampai akhir, kan juga mereka sudah banyak yang mau lulus trus juga sibuk sama skripsinya jadi kayak yang udah bukan jamannya lagi ngurusi PEMIRA gitu kan mbak, gantian sama adek-adek angkatannya” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Sependapat dengan pernyataan Wafa, Sesiil menambahi mahasiswa angkatan 2013 masih sering terlihat aktif dalam kegiatan Pemilu Raya, namun untuk angkatan 2012 dan diatasnya jarang sekali terlihat aktif dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu Raya periode 2016-2017. Sesiil menilai bahwa alasan mahasiswa angkatan 2012 keatas berpartisipasi politik pasif karena mereka banyak yang akan lulus dan banyak dari mereka sibuk mengurus skripsi. Penyampaian yang hampir sama juga disampaikan oleh Zaki, berikut penuturannya:

“Ohh kalau angkatan 2012 jarang mbak, ada beberapa tapi itu yang memang masih aktif menjadi DPM kalau yang mahasiswa lainnya tidak terlalu terlibat mbak, jadi hanya terlihat saja tapi untuk ikutan aktif gak begitu mbak” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Sepakat dengan pendapat rekan-rekan KPUR, Zaki mengatakan bahwa ada beberapa dari angkatan 2012 yang masih aktif karena menjadi anggota dari Dewan Perwakilan Mahasiswa/DPM, namun untuk mahasiswa PPKn angkatan 2012 lainnya tidak terlalu banyak terlibat dalam kegiatan Pemilu Raya periode 2016-2017. Banyak dari mahasiswa angkatan 2012 yang terlihat namun mereka tidak ikut berperan aktif dalam kegiatan Pemilu Raya. Sependapat dengan rekan-rekannya, berikut pernyataan Dini:

“Untuk angkatan 2013 sama 2015 sih banyak yah mbak yang ikut berpartisipasi dan terlibat di kegiatan Pemilu Raya tapi kalau yang untuk angkatannya mbak, angkatan 2012 itu sudah



mulai jarang mbak. Banyak yang gak ikut mbak, mereka juga jarang terlihat di kampus karena memang kan sudah gak ada kuliah tinggal skripsi aja jadi mereka keliatan sering ke kampusnya ngurusin skripsi mbak, kalau untuk ikut kegiatan Pemilu Raya kemaren saya sih jarang lihat mereka ikut berpartisipasi mbak” (wawancara: Selasa, 10 Mei 2016).

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh rekan-rekan KPUR, Dini juga memaparkan bahwa untuk mahasiswa PPKn angkatan 2012 jarang sekali terlihat mengikuti kegiatan Pemilu Raya, bahkan terlihat di kampus sudah jarang terlihat. Dini menuturkan bahwa ia jarang melihat mahasiswa PPKn angkatan 2012 di kampus, ia juga memberikan alasan mengapa mahasiswa angkatan 2012 tidak terlalu aktif dalam kegiatan Pemilu Raya karena mahasiswa angkatan 2012 cenderung lebih fokus mengurus skripsi yang mereka kerjakan. Berdasarkan pernyataan anggota KPUR diketahui bahwa partisipasi politik pasif didominasi oleh angkatan 2012 ke atas, hal ini dikarenakan beberapa hal salah satunya banyak dari mahasiswa PPKn angkatan 2012 sibuk dan fokus untuk mengurus skripsi yang sedang mereka kerjakan.

Golongan putih atau golput merupakan sekelompok orang yang menganggap bahwa sistem politik dan masyarakatnya telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan sehingga mereka memilih untuk tidak memberikan hak suaranya dalam memilih pemimpin. Tidak hanya apatis dalam memilih pemimpin namun mereka juga acuh dan tidak peduli dengan aturan atau sistem politik pemerintah. Sejumlah anggota masyarakat yang menjadi golongan putih ini tidak termasuk dalam partisipasi politik aktif maupun partisipasi politik pasif. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok apatis. Pada penelitian ini ditemukan sekelompok mahasiswa yang memilih untuk golput pada saat Pemilu Raya. Berikut hasil pernyataan KPUR yang menyatakan mahasiswa PPKn golput pada saat Pemilu Raya:

“...yang tidak nyoblos paling banyak itu dari angkatan 2012 keatas cuma sebagian. Padahal saya rasa sosialisasi yang saya lakukan baik berupa pengumuman yang ditempel di mading atau melalui media sosial sudah cukup maksimal...” (wawancara: Senin, 11 April 2016).

Wafa menjelaskan bahwa masih banyak mahasiswa yang memilih untuk golput dan tidak memberikan hak pilihnya pada saat pencoblosan Kahima dan Wakahima. Sebagian besar kelompok golput ini dilakukan oleh mahasiswa PPKn angkatan 2012. Wafa menyatakan bahwa mahasiswa PPKn angkatan 2012 mendominasi untuk golput pada Pemilu Raya periode 2016-2017. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh KPUR, diperoleh data hampir 80% mahasiswa

memberikan hak pilihnya sedangkan untuk yang 20% merupakan mahasiswa PPKn angkatan 2012 yang tidak memberikan hak pilihnya sehingga mereka memilih untuk golput atau apatis. Pada partisipasi politik pasif dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mahasiswa memilih untuk pasif, sedangkan golput merupakan salah satu hasil dari bentuk partisipasi politik pasif yang dilakukan mahasiswa angkatan 2012.

### Pembahasan

Peraturan ORMAWA tahun 2016 pada Bab VI Pasal 16 menjelaskan mengenai tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh KPUR. Salah satu tugas KPUR yang dapat memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa terdapat dalam point b yakni memberikan sosialisasi mengenai Pemilu Raya. Sosialisasi tersebut meliputi peraturan Pemilu Raya, agenda kegiatan, persyaratan, dan ketentuan (daftar kandidat, seleksi administratif, tes wawancara, debat kandidat, dan kampanye) serta tata cara dalam memilih. Alternatif baru yang digunakan dalam memaksimalkan sosialisasi Pemilu Raya melalui empat media social yaitu *BBM*, *line*, *whatsapp* dan *facebook*. Tugas dan fungsi merupakan bentuk dari adanya peran yang dimiliki seseorang. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, KPUR memberikan sosialisasi Pemilu Raya secara maksimal sehingga dapat dikatakan KPUR telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa KPUR telah berperan dalam menjalankan tugasnya sebagai KPUR.

Penelitian ini menggunakan peristilahan teori peran Biddle dan Thomas pada point yang pertama yakni orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi dalam dua golongan yakni aktor/pelaku merupakan orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu dan target/sasaran yakni orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Berdasarkan hal ini, KPUR merupakan aktor yang sedang menjalankan suatu peran sedangkan targetnya adalah mahasiswa PPKn Unesa. Interaksi tersebut dimunculkan dari adanya sosialisasi Pemilu Raya melalui media sosial. Bentuk interaksi mahasiswa adalah dengan mengomentari apa yang disosialisasikan KPUR, mahasiswa aktif bertanya langsung melalui media sosial mereka apabila ada yang kurang jelas, dan banyak mahasiswa yang ikut mencontoh gambar profil atau status dari sosialisasi yang diberikan KPUR melalui media sosial.

Pada penelitian ini diketahui bentuk partisipasi politik mahasiswa yakni partisipasi politik aktif, partisipasi

politik pasif dan golput atau kelompok apatis. Partisipasi politik aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan (Surbakti, 1992:142). Faktor yang memengaruhi partisipasi politik aktif mahasiswa pertama adalah faktor kesadaran politik yang tinggi. Diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa prodi PPKn angkatan 2013, 2014, dan 2015 memiliki kesadaran politik yang tinggi. Hal ini dibuktikan dari keaktifan mereka dalam mengikuti kegiatan Pemilu Raya mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 18 Maret 2016.

Faktor kedua adalah adanya sosialisasi Pemilu Raya yang dilakukan KPUR melalui media sosial *BBM*, *line*, *whatsapp* dan *facebook*. Sebagian besar mahasiswa merespon sosialisasi yang diberikan KPUR, bentuk respon mahasiswa adalah dengan memberikan komentar mengenai apa yang disosialisasikan oleh KPUR, mahasiswa aktif bertanya secara langsung melalui media sosial mereka apabila ada sosialisasi yang kurang jelas, mahasiswa juga sering mengganti gambar profil/*DP* dan status/*PM* di *BBM* mereka dengan mencontoh gambar dan informasi yang diberikan KPUR melalui media sosial. Media sosial yang paling berperan dan diminati oleh mahasiswa adalah *BBM* dengan alasan *BBM* merupakan aplikasi android yang mudah digunakan dan dimiliki oleh hampir semua mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa merespon apa yang disosialisasikan KPUR melalui *BBM*. Media sosial kedua yang diminati adalah *line*, ketiga *whatsapp*, keempat *facebook*.

Faktor ketiga adalah adanya ajakan teman. Pada penelitian ini ditemukan bahwa dengan ajakan teman atau rekan dapat mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya. Sebagian besar mahasiswa angkatan 2014 dan 2015 sangat aktif dalam mendukung calon kandidat pilihannya. Penelitian ini menemukan adanya beberapa kubu yang mendukung calon kandidat tertentu dan berusaha untuk saling mengajak rekan-rekan disekitarnya agar mendukung dan memilih calon kandidat yang sama. Bukan tidak mungkin ajakan teman menjadi salah satu faktor seseorang untuk memilih. Bahkan yang berawal dari ingin golput saja karena dengan ajakan teman menjadi berubah pikiran untuk memilih. Beberapa mahasiswa melakukan upaya-upaya untuk mengajak mahasiswa lainnya agar memilih calon kandidat yang didukungnya.

Partisipasi politik kedua adalah partisipasi politik pasif. Partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan

pemerintah (Surbakti, 1992:142). Partisipasi politik pasif mahasiswa disebabkan oleh faktor kesadaran politik yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa mahasiswa ditemukan tidak aktif dalam mengikuti kegiatan Pemilu Raya dan tidak merespon sosialisasi yang dilakukan KPUR melalui media sosial. Mahasiswa yang pasif didominasi oleh mahasiswa PPKn angkatan 2012 dan 2011. Berikut pendapat KPUR mengenai alasan mahasiswa PPKn angkatan 2012 dan 2011 memilih untuk pasif; 1) angkatan 2011 dan 2012 cenderung lebih fokus dengan skripsi yang belum terselesaikan; 2) beberapa dari mahasiswa angkatan 2012 dan 2011 sudah bekerja dan sibuk dengan pekerjaannya; 3) mahasiswa angkatan 2011 dan 2012 sebagian besar sudah tidak mengikuti perkuliahan sehingga jarang untuk ke kampus; 4) angkatan 2012 dan 2011 menganggap adanya Pemilu Raya prodi PPKn sudah tidak berpengaruh dalam kehidupannya.

Bentuk partisipasi politik yang ketiga adalah golput/golongan putih atau disebut juga kelompok apatis. Golongan putih atau golput merupakan sekelompok orang yang menganggap bahwa sistem politik dan masyarakatnya telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan sehingga mereka memilih untuk tidak memberikan hak suaranya dalam memilih pemimpin (Surbakti, 1992:142). Mahasiswa memilih golput karena faktor sistem politik dan masyarakatnya dianggap sudah tidak sesuai dengan harapan. Laporan Pertanggungjawaban KPUR menjelaskan sebagian besar mahasiswa angkatan 2012 memilih untuk tidak memberikan hak pilihnya atau golput. Alasan mereka golput karena mereka menganggap sistem politik dan masyarakatnya sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang mereka inginkan sehingga mereka lebih memilih untuk mengurus kepentingannya dibandingkan berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilu Raya.

Presentase perolehan suara berdasarkan surat pertanggung jawaban Pemilu Raya Prodi PPKn periode 2016-2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi politik. Pada Pemilu Raya periode 2015-2016 dari 356 pemilih dapat dipresentasikan 72% dan 17 surat suara tidak sah sedangkan untuk Pemilu Raya pada periode 2016-2017 cukup terjadi peningkatan dan kemajuan yakni terdapat 365 pemilih, jika dipresentasikan sekitar 78% dan 8 surat suara tidak sah. Selisih perolehan untuk Pemilu Raya dari tahun sebelumnya memang tidak terlalu jauh namun terjadi peningkatan partisipasi politik pada Pemilu Raya periode 2016-2017 oleh karena itu dapat dikatakan KPUR melalui media sosial telah berperan dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada Pemilu Raya Prodi PPKn di Unesa periode 2016-2017.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan penelitian "Peran KPUR melalui Media Sosial dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa pada Pemilu Raya Prodi PPKn Unesa Periode 2016-2017" adalah melalui sosialisasi Pemilu Raya yang meliputi peraturan Pemilu Raya, agenda kegiatan, persyaratan dan ketentuan (daftar kandidat, seleksi administratif, tes wawancara, debat kandidat dan kampanye) serta tata cara dalam memilih. sosialisasi ini dilakukan melalui 4 media sosial yaitu *BBM*, *line*, *whatsapp* dan *facebook*. Tugas dan fungsi merupakan bentuk dari adanya peran yang dimiliki seseorang. berdasarkan hal ini, seseorang sedang menduduki suatu peran sebagai KPUR dimana mereka memiliki tugas untuk memberikan sosialisasi mengenai Pemilu Raya. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, Komisi Pemilihan Umum Raya telah memberikan sosialisasi Pemilu Raya secara maksimal sehingga KPUR telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa KPUR telah berperan dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisi Pemilihan Umum Raya.

Penelitian ini menggunakan peristilahan teori peran dari Biddle dan Thomas yakni orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, terdapat 2 golongan yakni aktor yaitu orang yang sedang menjalankan suatu peran dan target atau orang yang mempunyai hubungan dengan aktor. Berdasarkan hal ini, KPUR merupakan aktor dan mahasiswa PPKn merupakan target. Adanya keterkaitan antara aktor dan target akan menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial ini dihasilkan dari adanya sosialisasi yang dilakukan KPUR melalui media sosial. Sosialisasi dengan cara tersebut dapat memancing mahasiswa untuk membaca dan merespon secara langsung apa yang disosialisasikan oleh KPUR sehingga dari respon tersebut memunculkan adanya interaksi sosial diantara keduanya.

Berdasarkan hasil data penelitian membuktikan bahwa terdapat interaksi sosial yang ditimbulkan dari adanya sosialisasi Pemilu Raya melalui media sosial. Hal ini memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa. Data penelitian menghasilkan adanya partisipasi politik mahasiswa yang terbagi dalam partisipasi politik aktif, partisipasi politik pasif dan golput atau kelompok apatis. Partisipasi politik aktif mahasiswa dipengaruhi oleh adanya 3 faktor yakni kesadaran politik yang tinggi, sosialisasi Pemilu Raya melalui media sosial dan faktor ajakan teman. Partisipasi politik pasif dipengaruhi oleh adanya faktor kesadaran politik yang

rendah sedangkan untuk golput atau kelompok apatis dipengaruhi oleh faktor ketidaksesuaian sistem politik dan masyarakatnya.

### Saran

Berdasarkan penelitian pada Pemilu Raya Prodi PPKn Unesa periode 2016-2017 membuktikan bahwa sebagian besar angkatan 2011 dan 2012 memiliki kesadaran politik yang rendah sehingga mereka cenderung pasif dan golput. Hal ini memberikan penilaian yang buruk terhadap prodi PPKn karena dengan menjadi warga PPKn seharusnya dapat memberikan contoh bagaimana menjadi warga Negara yang baik dengan salah satunya memberikan hak pilihnya pada saat Pemilu Raya. Berdasarkan alasan tersebut KPUR diharapkan dapat lebih memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas. Bila perlu digunakan inovasi baru tidak hanya dalam memberikan sosialisasi saja namun juga dalam tugas-tugas yang lainnya sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang pasif dan golput pada saat Pemilu Raya Prodi PPKn di Unesa untuk periode selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baran, Stanley J & Dennis K Davis. 2010. *Teori Dasar Komunikasi Pergolakan, dan Masa Depan Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miles, B. Mathew dan Hubberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Dedy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Severin, Werner J & James W. Tankard, Jr. 2005. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kominfo. Kamis, 9 Oktober 2014 11:50 am. *bintang.Jakarta.BeritaKementerian* (diakses 12 November 2015).
- Errika Dwi Setya Watie. 2011. *Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*. ([http://journal.usm.ac.id/elibs/USM\\_25a3komunikasi%20dan%20media%20sosial.pdf](http://journal.usm.ac.id/elibs/USM_25a3komunikasi%20dan%20media%20sosial.pdf) diakses pada 26 Januari 2016).



Marratu Fahri. 2008. Peranan Penyelenggaraan Pemilu

Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. 2010. (<https://www.scribd.com/doc/63799736/Kaplan-and-Haenlein-2010-Social-Media> diakses pada 23 Januari 2016 11.45).

Peraturan Organisasi Mahasiswa Nomor 1 tentang Pemilihan Umum Raya Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Tahun 2016 Bab VI Pasal 13 tentang Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR).

Peraturan Organisasi Mahasiswa Nomor 1 tentang Pemilihan Umum Raya Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Tahun 2016 Bab VI Pasal 16 tentang Tugas Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR).

